



World Agroforestry Centre (ICRAF) dalam membangun peta jalan reformasi tenurial di Indonesia

Oleh Gamma Galudra

Tanah yang dialokasikan bagi perhutanan sosial di Boalemo Gorontalo umumnya terdegradasi dengan kemiringan yang tinggi. Foto: World Agroforestry Centre/Nurain Lapolo

Di Indonesia, pembangunan berkeadilan khususnya di pedesaan, menjadi program prioritas pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pembangunan. Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla menjanjikan “Nawa Cita”, yang salah satu diantaranya adalah pengakuan hak tenurial masyarakat Indonesia, melalui skema Perhutanan Sosial dengan target 12,7 hektar lahan hutan dan Reforma Agraria seluas 9 juta hektar. Skema tersebut dibangun untuk mencoba menjawab tantangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, persawahan, perkebunan dan wanatani rakyat serta wilayah adat. Reformasi tenurial hutan dan agraria ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi rakyat baru berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kelestarian.

Pada tahun 2011, pemerintah bersama masyarakat sipil menggagas konferensi internasional tentang tenurial hutan di Lombok, yang bertujuan untuk mendorong pembenahan tata pemerintahan dalam penguasaan lahan dan hutan. Konferensi ini menghasilkan

Peta Jalan Tenurial sebagai kesepakatan bersama yang terus berkembang hingga kini menjadi salah satu Program Prioritas Nasional, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016. Namun, implementasi reformasi tenurial hutan ini hasilnya beragam dan belum mencapai target yang diharapkan. Hambatan yang sering dihadapi umumnya terkait dinamika politik ekonomi dan kebijakan, terkait reformasi tenurial hutan.

ICRAF bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kantor Staf Presiden RI (KSP), menyelenggarakan Konferensi Tenurial 2017 pada tanggal 25-27 Oktober 2017 di Jakarta. Dengan mengusung tema “Mewujudkan Hak-Hak Rakyat: Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan di Indonesia”, tujuan dari konferensi ini adalah:

- 1) Meninjau ulang dan merevisi peta jalan tenurial yang dikembangkan pada masa pemerintahan sebelumnya.

- 2) Meningkatkan kolaborasi dan saling berbagi data bersama untuk menuju pemenuhan target pemerintah.
- 3) Memunculkan kesepakatan dan koordinasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program reforma agraria melalui perhutanan sosial serta legalisasi dan redistribusi tanah untuk mencapai pembangunan berkeadilan.

Selain berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan konferensi ini, ICRAF, bersama CIFOR dan SAMDHANA, bekerjasama menyusun peta jalan reforma tenurial dalam penanggulangan dan pengendalian perubahan iklim. Seperti diketahui, komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi di tingkat internasional tidak diragukan lagi. Hal ini ditunjukkan dalam Perjanjian Paris yang menyebutkan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional di atas skenario *Business as Usual* pada tahun 2030, seperti tercantum dalam dokumen NDC (*Nationally Determined Contribution*).



Presentasi World Agroforestry Centre (ICRAF) saat acara Konferensi Tenurial 2017, tanggal 25-27 Oktober di Jakarta. Foto: World Agroforestry Centre/Aenunaim

Namun, salah satu kendala utama dalam mengimplementasikan komitmen di tingkat lokal adalah ketidakpastian tenurial, termasuk risiko perampasan tanah oleh pihak luar dan hilangnya hak masyarakat terhadap lahan dan sumberdayanya. Namun, tantangan isu perubahan iklim cukup luas sehingga menghambat upaya reformasi tenurial dalam membangun efektivitas perubahan iklim dan REDD+.

Dari dua hasil diskusi pada tanggal 6 Oktober dan 28 Oktober 2017, telah ditemukan beberapa hambatan yang telah teridentifikasi. Beberapa hambatan

tersebut adalah: i) konflik dan konsep tenurial, ii) definisi hutan, iii) legalitas dan legitimasi pengukuhan kawasan hutan, iv) tata kelola polisentrik, v) keterwakilan peta tenurial masyarakat dalam Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*), vi) rencana tata ruang, dan vii) skema distribusi bagi hasil.

Sebagai titik awal untuk perdebatan dalam membangun peta jalan, naskah akademik ini akan menjajaki beberapa hubungan utama dan menggambarkan ke-tujuh isu terkait, dalam konteks Indonesia, yang saat ini mencegah

perubahan tenurial yang 'efektif'. Di dalam konferensi ini, ICRAF bersama CIFOR dan SAMDHANA menganalisis langkah-langkah lanjutan yang mampu memecah kebuntuan bagi semua pihak untuk melakukan reformasi tenurial hutan dan lahan di dalam agenda perubahan iklim. Diharapkan bahwa reformasi tenurial ini mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat desa hutan dan juga mampu mengendalikan perubahan iklim yang dipersyaratkan oleh komunitas global.

Sambungan dari halaman 4

Trigona, mereka diajak berkunjung ke desa pembelajaran lebah Trigona di Lombok Utara. Di desa pembelajaran ini mereka belajar dan membandingkan sistem budidaya lebah madu Trigona. Bahkan, mereka juga mempelajari pengelolaan pusat pembelajaran lebah Trigona. Berbeda halnya dengan petani penyuluh Sumba Timur, mereka lebih membutuhkan pengetahuan mengenai pembibitan dan perbanyakan tanaman sehingga menghasilkan bibit secara cepat dan berkualitas baik. Sesuai dengan kebutuhan tersebut, mereka diajak untuk berlatih membuat pembibitan dan perbanyakan vegetatif tanaman buah di Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian dan Kelompok Tani Karya Duta di Cipaku, Bogor. Melalui kegiatan kunjungan belajar dan *on site training* tersebut

diharapkan petani penyuluh meningkat keterampilan teknis dan wawasannya.

Penguatan sistem pendukung petani penyuluh

Selain meningkatkan kapasitas pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani penyuluh sebelum terjun ke lapangan, diperlukan pula penguatan sistem pendukung. *Mentoring* (pengarahan, pembinaan dan pendampingan) sebagai suatu sistem pendukung bagi petani penyuluh pemula sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan nasehat. Pengarahan untuk memanfaatkan bahan dan alat sederhana yang tepat dengan kondisi setempat juga dapat membantu petani penyuluh dalam menjalankan tugasnya.

Sistem dukungan lain yang perlu dilakukan untuk keberlanjutan kerja bagi petani penyuluh adalah membangun jejaring untuk mencari dukungan dari pelaku pembangunan seperti pemerintah, LSM, sektor swasta dan universitas. Dukungan tersebut penting bagi petani penyuluh dalam menjalankan kerjanya. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut petani penyuluh merasa lebih dihargai sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya. Dengan demikian mereka dapat pula berperan menjadi agen pembangunan melalui penyebaran pengetahuan dan teknologi agroforestri ke daerah terpencil yang belum terjangkau pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya, sehingga mendukung kemajuan pembangunan daerah.